



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 792/X/2013

III/OKTOBER 2013



Komisi III Setujui Sutarman Secara Aklamasi



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA OKTOBER 2013

Minggu Ketiga Oktober 2013, kegiatan Dewan ditandai dengan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD DPR) dan laporan perkembangan pembahasan beberapa RUU dalam Masa Sidang I 2013-2014 ini. Berikut beberapa laporannya:

Kegiatan Komisi III

Kegiatan Komisi III pada Kamis 17 Oktober 2013, adalah melakukan *fit and proper test* calon Kapolri sebagaimana amanat Rapat Bamus. *Fit and proper test* dilakukan terhadap calon tunggal yang diajukan Presiden, yaitu Komjend Pol. Sutarman. Kegiatan ini dilakukan sepanjang hari, mulai siang dan dilanjutkan hingga malam hari, dengan penyampaian visi dan misi oleh calon. Rapat Komisi III dipimpin oleh Ketua Pieter C. Zulkifli didampingi tiga Wakil Ketua Komisi III. Pada sidang malam hari, Komisi III memutuskan bahwa Komjend Pol. Sutarman secara aklamasi disetujui menjadi calon Kapolri menggantikan Jendral Pol. Timur Pradopo.

Kegiatan Komisi IV

Komisi IV mengadakan Raker dengan Menteri Kehutanan dengan menghadirkan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara beserta Bupati/walikota se-provinsi Kaltim, Kaltara dan tim terpadu pada 7 Oktober 2013. Rapat ini untuk mendapatkan penjelasan sehubungan dengan adanya surat Menteri Kehutanan tertanggal 2 Agustus 2013 kepada DPR, tentang usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur.

Komisi IV mengadakan RDP dengan Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka membahas usulan perubahan kawasan hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Utara, pada 2 Oktober 2013. Kesimpulan rapat ini antara lain, Komisi IV akan membentuk Panja RTRWP Sulawesi Utara, selanjutnya Panja akan melakukan kunjungan spesifik untuk melihat secara langsung, sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



hutan dalam revisi RTRWP Sulawesi Utara.

Komisi IV juga mengadakan Raker dengan Menteri Kehutanan dengan Gubernur Sulawesi Utara dan tim terpadu, untuk mendapatkan penjelasan atas surat Menteri Kehutanan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Utara. Komisi IV juga akan menghadirkan para pakar kehutanan dan tata ruang untuk mendapatkan penjelasan dan pendalaman mengenai dampak penting cakupan luas dan bernilai strategis sesuai dengan pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain itu, Komisi IV juga merencanakan Kunker dalam rangka penyusunan dan perumusan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air ke ITB Jawa Barat, UGM Jogjakarta, dan Universitas Mulawarman Kaltim. Kunker juga dilakukan

dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke ITB dan Unpad Bandung, Undip Semarang, dan Unbraw Malang. Kunker juga akan dilakukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan ke Universitas Riau di Riau, Perguruan Tinggi di Jogjakarta, dan Unhas di Sulawesi selatan. Kunjungan-Kunjungan ini dalam rangka jaring aspirasi untuk mendapat masukan dari masyarakat, pakar, akademisi maupun LSM.

Kunjungan spesifik Komisi IV dilakukan ke Provinsi Riau, meninjau secara langsung perambahan kawasan konservasi Taman Nasional Tessoililo, kunjungan ke Provinsi Banten meninjau konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

ke Provinsi Kalbar meninjau dampak serangan hama jeruk terhadap produksi buah jeruk, dan kunjungan spesifik lainnya.

Kegiatan Legislasi

Minggu terakhir Masa Sidang I tahun sidang 2013-2014, berbagai RUU dilaporkan masih meminta perpanjangan untuk melanjutkan pembahasan pada Masa Sidang II yang akan datang. RUU yang dimintakan perpanjangan ada 29 RUU, antara lain: RUU tentang ASN, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Daerah Otonom Baru, dan RUU tentang Pertanahan yang ditangani Komisi II. RUU tentang Perindustrian dan Perdagangan yang ditangani Komisi VI. RUU tentang Tapera, RUU tentang Desa, yang ditangani Pansus. RUU tentang Kejaksaan RI, RUU tentang MA, RUU tentang HAP, RUU tentang KUHAP oleh Komisi III.

RUU tentang ASN telah mengalami 7 kali perpanjangan. Pembahasan RUU ASN masih dilakukan dalam tahap Panja, dan Pemerintah telah menyesuaikan pembahasannya dengan draft DPR-RI yang tertuang dalam 480 DIM. Pembahasan RUU ASN dilakukan secara DIM per DIM, dan telah dibahas sampai DIM nomor 121. RUU ini masuk dalam Prolegnas tahun 2013 yang diminta diprioritaskan dalam pembahasannya antara Pemerintah dan DPR. RUU ini telah menyetujui beberapa substansi, diantaranya pengaturan dua jenis pegawai; pengaturan tiga jenis jabatan; pengaturan jabatan pimpinan tinggi; pengaturan mengenai fungsi pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, yang nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, sebagaimana keputusan Rapat Pleno Baleg tanggal 3 Oktober 2013, ada 2 RUU yang disepakati untuk

dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional, yaitu RUU Revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres), dan RUU tentang RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). RUU Pilpres telah diputuskan dan disepakati penyusunannya tidak dilanjutkan, dan draft RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2013. Pembahasan RUU PPDT sudah dilakukan pada tahap pembahasan DIM di tingkat Panitia Kerja (Panja), bahkan sudah memakan 7 (tujuh) kali masa sidang. Namun pembahasannya sempat terhenti sampai waktu yang cukup lama, karena belum ada kesepakatan terhadap satu substansi yaitu judul RUU yang akan mempengaruhi substansi lain dalam Batang Tubuh RUU PPDT.

Adapun pembahasan RUU Pemilukada yang ditangani Komisi II, masih menyisakan beberapa isu krusial dalam proses pembahasan antara lain yaitu: mekanisme pemilihan, khususnya fokus Pemilihan Gubernur, dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD; Pemilihan Bupati atau Walikota dilaksanakan secara langsung atau pemilihan melalui DPRD; satu paket atau tidak satu paket calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; syarat Kepala Daerah (ikatan perkawinan); tugas, wewenang dan syarat calon Wakil Kepala Daerah; penyelesaian sengketa Pemilukada; Pilkada serentak; dana penyelenggaraan Pilkada; pembatasan dana kampanye.

Diplomasi Parlemen

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian Sidang Umum ke-129 IPU di Jenewa-Swiss pada tanggal 4-9 Oktober 2013. Dalam rangkaian sidang IPU ini, Ketua Delegasi, Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN) dan Anggota Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) memimpin Sidang *Committee on International Humanitarian Law* dan Sidang *Coordinating Committee of Women Parliamentarians* dalam kapasitas sebagai Presiden di masing-masing alat kelengkapan IPU tersebut. Anggota delegasi DPR RI yang juga menduduki jabatan strategis di IPU adalah Tantowi Yahya (F-PG) yang menjadi anggota *Advisory Group on HIV/AIDS* dan Hj. Herlini Amran (F-PKS) yang menjadi anggota *Committee on Middle East Questions*.

Selain itu, anggota Delegasi DPR-RI lainnya, yaitu Hj. Himmatul Aliyah Setiawaty (F-PD), Meutya Viaada Hafid (F-PG), dan Dr. Ir. Arif Budimanta (F-PDIP) juga aktif menyampaikan intervensi baik dalam setiap Diskusi-diskusi Panel maupun dalam pertemuan *IPU Committee on UN Affairs* serta *Meeting of the Forum of Young MPs*. Dalam statementnya Delegasi menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Parlemen Indonesia yang berkaitan dengan agenda-agenda yang dibahas, seperti isu pembangunan dan kependudukan, pengurangan senjata pemusnah massal/nuklir, Hak Asasi Manusia, *indigenous people, persons with disabilities*, dan sebagainya.

Di sela-sela sidang, Delegasi DPR RI juga mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Jepang, Inggris, Thailand, Chili, China dan Perancis.**



Menkumham Amir Syamsuddin dan Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Komisi III Setujui Sutarman Secara Aklamasi

Proses panjang uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri yang berlangsung lebih dari 12 jam itu akhirnya berakhir. Kandidat tunggal yang telah diusulkan presiden disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi.

“Komisi III menerima pemberhentian Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan menyepakati pencalonan Komjen Sutarman. Apakah seluruh anggota menyetujui?” tanya Ketua Komisi III, Pieter C. Zulkifli. Sahutan setuju dari peserta rapat kemudian memenuhi ruang sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/13).

Sebelum meminta persetujuan, masing-masing juru bicara fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding mengingatkan Presiden SBY patut menyampaikan alasan yang jelas kepada publik mengapa mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang baru memasuki masa pensiun Januari nanti.

Sementara itu kepada wartawan usai rapat calon Kapolri terpilih Komjen Pol. Sutarman menekankan kembali program utamanya, apabila nanti bertugas memimpin institusi Korps Bhayangkara tersebut. Ia berkomitmen untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Saya akan berupaya dapat menghadirkan anggota saya saat masyarakat membutuhkan itu aspek pencegahan. Dari aspek penindakan kita akan beri penekanan pada kasus narkoba, terorisme dan korupsi. Itu janji yang harus dipenuhi kalau tidak dosa,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi menyebut hasil *fit and proper test* ini akan segera disampaikan pada rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk kemudian ditetapkan menjadi



Ketua dan Anggota Komisi III DPR berbincang dengan anggota Kopolnas.

keputusan DPR dalam rapat paripurna terdekat.

Rekam Jejak

Sebelumnya, Komisi III DPR RI meminta masukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) terkait rekam jejak calon Kapolri Komjen Pol. Sutarman. Seluruh input yang diperoleh untuk melengkapi data pada saat uji kepatutan dan kelayakan yang segera dilaksanakan.

“Kopolnas telah mendalami rekam jejak kandidat saat bertugas di sejumlah daerah di Indonesia. Itu akan menjadi tolok ukur untuk menganalisa perilaku dan gaya kepemimpinan kandidat. Apa yg kita dapat akan kita evaluasi, termasuk yang kita peroleh dari sumber lain. Semua akan kita gunakan dalam *fit and proper test* besok,” kata Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/13).

Politisi FP Demokrat ini menambahkan masukan yang disampaikan sesuai Perpres no.17/2011 tentang fungsi dan peran Kopolnas yang diantaranya bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi rekam jejak calon Kapolri. Sejauh ini lanjutnya komisi yang dipimpinnya juga telah menerima masukan dari masyarakat tentang kandidat yang saat ini menjabat Kabareskrim Mabes Polri.

Bicara pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi menjelaskan dalam rapat yang berlangsung tertutup itu dapat disimpulkan sejauh ini tidak ada transaksi mencurigakan dari sejumlah rekening Komjen Pol. Sutarman dan keluarga yang ditelisik PPATK.

“Tadi disampaikan rekening calon Kapolri diperbankan nasional, ditelusuri juga rekening isteri dan anaknya. Dari profil itu, transaksi yang mencurigakan tidak ada. Itu temuan PPATK sesuai perundang-undangan,” pungkaskan Tjatur. (iky)Foto:wahyu/parle

Media Harus Kembangkan Sikap Optimis terhadap Demokrasi

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam demokrasi sehingga diharapkan dapat mengembangkan sikap optimisme, bukan malah menyebarkan pesimisme terhadap demokrasi. Hal ini disampaikan Hajriyanto Thohari anggota DPR yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik di Auditorium Gedung 1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Kamis (17/10).



Anggota DPR Hajriyanto Thohari (F-PG) didampingi Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan para panelis seminar di UI.

“Perkembangan demokrasi di negara kita membutuhkan kesungguhan dan keseriusan untuk menanganinya. Demokrasi itu bukan sesuatu yang instan, tapi memerlukan perjuangan untuk mengembangkannya. Karena itu, semua pihak diminta untuk memiliki kepedulian yang besar untuk pengembangan dan penguatan demokrasi, termasuk media massa,” paparnya.

Politisi FP Golkar DPR ini mengingatkan agar media massa jangan hanya menyiarkan demokrasi Indonesia yang masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Ia menyadari, bahwa ini sesuatu yang tidak terbantahkan.

“Tapi, jangan sampai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam praktek demokrasi di negara ini menjadikan kita tidak percaya terhadap demokrasi. Media punya peran besar dalam mengembangkan optimisme di masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil Jateng IV ini menambahkan, proses penguatan dan pengembangan demokrasi akan terus berjalan dan akan menuju perbaikan dan kesempurnaan. Tidak ada di dunia ini, tambahnya, demokrasi yang tidak memiliki kesalahan, karena demokrasi itu adalah proses untuk menuju demokratisasi dan menggapai kedaulatan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Proses demokrasi itu harus dikawal dan dihela dengan sungguh-sungguh, dan tidak benar kalau kita mengembangkan pesimisme. Seakan demokrasi kita sudah semakin rusak dan bobrok. Media massa harus memberikan pendidikan politik yang benar bagi masyarakat,” jelas pria berkacamata ini.

Latar belakang dari seminar ini adalah keberadaan media massa yang begitu dekat dengan masyarakat. Media massa berperan dalam menggiring opini publik, mempengaruhi kebijakan, membangun citraan bagi individual maupun kolektif. Selain itu, media juga mampu menyatakan keberpihakan dan membangun wacana di masyarakat. Dalam perjalanan membangun demokrasi, media diharapkan dapat membangun sinergi antara masyarakat dan elit, sekaligus menjadi perantara dalam menginformasikan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan.

Selain Hajriyanto, hadir pula sebagai panelis adalah Kombes Pol Agus Riyanto dari Humas Mabes Polri, Chusnul Mar’iyah, dan Ninok Laksono dari Dewan Pers. Moderator acara langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya sekaligus Wakil Rektor UI Bidang Akademik Bambang Wibawarta. (sf)

Perlu Ada Syarat Terukur Bagi Kepala Daerah

RUU Pilkada yang sedang dirumuskan DPR harus menyusun syarat kepala daerah secara terukur. Persyaratan itu tidak saja menyangkut larangan mengembangkan dinasti politik, tapi juga harus mengukur calon kepala daerah dari elektabilitas, pendidikan, kapasitas, dan moralitasnya.

Demikian mengemuka dalam dialog Forum Legislasi di Press Room DPR, Kamis (17/10), dengan topik menyoal



Ketua Komisi II DPR Agus Gunandjar Sudarsa, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman.

politik dinasti yang sedang hangat diperbincangkan. Hadir sebagai pembicara Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG), peneliti LIPI Siti Zuhro, dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman.

Menurut Agun, calon kepala daerah harus diberi persyaratan ketat. Jangan tiba-tiba diusung lalu dipilih. Jangan pula karena anak seorang penguasa daerah, lalu dia dicalonkan menjadi kepala daerah. Untuk menyehatkan demokrasi di pusat dan daerah, sumber persoalannya ada di partai politik.

Bila parpol, kata Agun, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya, dia akan memberikan input yang bagus pula bagi demokrasi di daerah. Dari parpol yang sehat itulah, akan lahir pemimpin yang berkualitas. Dan kecenderungan membangun dinasti bisa dihindari dengan mengoptimalkan peran parpol.

Sementara itu peneliti LIPI Siti Zuhro mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Indonesia sangat komunal dan permisif. Dengan kondisi itu, butuh waktu lama untuk membenahi demokrasi di Tanah Air. Yang harus ikut membenahi pula demokrasi ini adalah *civil society*. Namun, *civil society* juga agak lama untuk bisa tumbuh. Ada banyak persoalan di masyarakat, apalagi ada keengganan dari parpol untuk mereformasi diri.

Ini, kata Zuhro, dilema yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangaun demokrasi yang sehat dan bermutu. Namun, kita tak perlu ikut mengekor dengan demokrasi di negara-negara maju. Kita punya nilai demokrasi sendiri. Pada bagian lain Zuhro mengatakan, dengan ramainya pembicaraan kasus dinasti di Banten, ini menjadi berkah tersendiri agar RUU Pilkada kembali menampung wacana pembatasan politik dinasti. (mh) Foto:wahyu/parle

Kemensos Diminta Lebih Proaktif Validasi Data Kemiskinan

Komisi VIII DPR RI megharapkan Kemensos lebih proaktif lagi dalam Validasi Data Kemiskinan. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja (raker) Komisi VIII dengan Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, Kamis (17/10).

“Program keluarga harapan (PKH) menargetkan 3,25 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM). Namun dalam laporannya Kementerian sosial mengatakan masih menunggu data RTSM di kecamatan dari PNP2K. Jadi data 3,25 juta RTSM itu rumah tangga yang mana. Ini sangat ironis buat saya, bagaimana mungkin kita melakukan pengawasan jika sampai sekarang kita masih menunggu data tersebut. Tentu Kemensos menargetkan sasaran terhadap 3,25 juta RTSM berdasarkan



Anggota Komisi VIII DPR Ketut Sustiawan.

data,” tegas Anggota Komisi VIII, Ketut Sustiawan.

Ditambahkannya, validasi data keluarga miskin kerap menjadi permasalahan di Kementerian Sosial oleh karena itu agar pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin dilaksanakan secara terpadu, dan terintegrasi dari kecamatan, daerah hingga ke tingkat pusat. Komisi VIII DPR RI megharapkan agar Kementerian Sosial lebih proaktif lagi dalam memperbaiki data-data yang dibutuhkan.

“Jangan sampai ada kesalahan atau ketertinggalan data keluarga miskin lagi, karena akhirnya malah akan membuat dana bansos menjadi tidak tepat sasaran atau tidak sesuai target yang diharapkan,” untkapnya. (Ayu)

Foto:wahyu/parle

Pemprov Sumut Tuntut 58,88% Saham Inalum

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih membicarakan soal penguasaan saham PT. Inalum yang segera diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pemprov Sumut menuntut penguasaan 58,88% saham Inalum.

Demikian mengemuka dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlang-

ga Hartarto, Kamis (17/10). Selain Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, hadir pula wali kota dan bupati se-provinsi Sumut. Bahkan, dihadiri pula perwakilan DPRD setempat. Wakil Gubernur Sumut mengungkapkan, Pemprov Sumut sebelumnya selalu menerima fee dari Inalum. Namun, sejak 2 tahun terakhir tak pernah menerima fee lagi.

Bahkan, Wakil Gubernur menegaskan di hadapan rapat Komisi VI bahwa keberadaan PT. Inalum sudah tidak bermanfaat lagi bagi Pemda dan masyarakat Sumut. Pihaknya meminta dukungan Komisi VI DPR, agar Pemprov Sumut bisa mendapatkan saham di PT. Inalum yang diambil alih oleh pemerintah pusat tersebut.

Hampir semua anggota Komisi VI



Suasana RDP Komisi VI DPR dengan Pemprov Sumut.

menghargai perjuangan dan harapan Pemprov Sumut untuk menguasai 58,88% saham Inalum. Dukungan kepada Pemprov untuk menguasai sebagian saham Inalum merupakan keniscayaan. Dengan begitu, ada sum-

ber pendapatan bagi daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah setempat.

Proses pengambilalihan PT. Inalum nanti akan melibatkan 9 kementerian

yang dipimpin Menko. Dan pembagian sahamnya akan diatur setelah PT. Inalum benar-benar sudah dikuasai pemerintah Indonesia pada 1 November 2013. (mh), foto :naefuroji/parle/hr.

Indonesia Perlu Impor Gandum dari Ukraina

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Nazaruddin Kiemas mengusulkan pemerintah perlu melakukan impor gandum dari Ukraina. Pasalnya gandum dari negara Eropa Timur bekas Uni Soviet tersebut berkadar protein lebih bagus dibanding dari India dan Australia yang selama ini dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Hal itu dikatakan Nazaruddin ketika mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia Volodymyr Vechenko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Nazaruddin mengakui, jarak yang cukup jauh dengan Ukraina berpengaruh kepada harga komoditas gandum jika Indonesia mengimpornya. Meski demikian, menurut anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, kualitas gandum Ukraina lebih tinggi. Untuk itu dia mengusulkan bea masuk gandum dari Ukraina bisa dikurangi sehingga

bisa bersaing dengan harga gandum yang didatangkan dari India maupun Australia.

Jadi sambung Nazaruddin, yang kita harapkan adalah kualitas gandum lebih baik yang kini telah menjadi bahan makanan pokok setelah beras, diantaranya sebagai bahan baku untuk mie dan roti yang sehari-hari cukup banyak keperluannya. "Bandingkan dengan kadar protein gandum India 1% sementara dari Ukraina 4%, sehingga kita harapkan kebutuhan protein anak-anak bangsa bisa dipenuhi," tegasnya.

Volodymyr Vechenko yang didampingi Dubes Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil dan staf serta Dubes Indonesia untuk Ukraina Niniek Kun Naryatie menyambut baik usulan tersebut dan akan dibicarakan dengan menteri terkait di Ukraina.

Berdasarkan data yang ada, kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara cukup signifikan. Ukraina



Anggota BKSAP DPR Nazaruddin Kiemas.

merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur setelah Rusia. Terdapat trend positif pertumbuhan nilai perdagangan Indonesia-Ukraina selama empat tahun dari 2008-2012 sebesar 3,7%.

Pada tahun 2012 lalu, total nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 1,32 miliar, disbanding tahun 2011 sebesar USD 1,27 miliar. Sayangnya, neraca perdagangan tersebut menunjukkan posisi defisit bagi Indonesia dimana tahun 2011 sebesar USD 131.975 dan tahun 2012 Indonesia defisit USD 225.197 atau naik sebesar 70%. (mp), foto :naefuroji/parle/hr.

BAKN Desak Selesaikan Proses Likuidasi Badan Otorita Batam

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Kepada Kementerian Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk segera menyelesaikan proses likuidasi Badan Otorita Batam.

an, BP Batam menyajikan Piutang Usaha per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp13,75 miliar dan Rp30,36 miliar. Saldo Piutang Usaha sebesar Rp1,74 miliar pada RSOB belum dapat diyakini kewajarannya karena penatausahaan piutang usaha pada RSOB belum memadai. Selain itu, saldo piutang usaha

permasalahan tersebut masih terjadi pada tahun 2011. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo aktiva tetap.

Catatan 11 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Lain-lain pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 107,39 miliar dan Rp 89,57 miliar. Dari saldo sebesar Rp 107,39 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya masing-masing sebesar Rp 34,80 miliar dan Rp 5,41 miliar. Saldo Piutang Tidak Lancar tersebut yang terdapat pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak didukung dengan rincian debitor dan faktur sebesar Rp 31,18 miliar, dan saldo Lainnya sebesar Rp 5,41 miliar tidak memiliki dasar kebijakan akuntansi atas pembentukannya serta tidak ada dokumen pendukung atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya (Aktiva Lain-Lain).

Catatan 15 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan, saldo Titipan Pihak Ketiga pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 43,76 miliar dan Rp 40,79 miliar. Dari saldo sebesar Rp 43,76 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Penerimaan Sementara sebesar Rp 5,83 miliar dan saldo Lain-lain sebesar Rp 16,04 miliar. BP Batam tidak dapat menyajikan dasar kebijakan akuntansi untuk pembentukan akun Penerimaan Sementara dan akun Lain-lain dan tidak ada dokumen pendukung atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo Penerimaan Sementara dan saldo Lain-lain.

Catatan 19 atas Laporan Keuangan



Ketua dan Anggota BAKN bersama Kepala BP Batam dan jajarannya.

Hal itu mengemuka saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI, guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2011, kepada Kepala BP Batam dan jajarannya. Jum'at (11/10), di Batam Center, Pulau Batam.

Untuk itu diharapkan neraca akhir Otorita Batam menjadi neraca awal BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). "BAKN meminta proses likuidasi Badan Otorita Batam selesai pada akhir tahun 2013 atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari sekarang," tegas Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.

Selanjutnya, BAKN meminta kepada BPKP sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan bantuan dan dukungan untuk perbaikan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BP Batam.

Patut diketahui, berdasarkan Laporan BPK, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas Laporan Keuang-

sebesar Rp13,75 miliar tersebut, belum termasuk piutang UWTO sebesar Rp248,55 miliar pada Neraca BP Batam per 4 Februari 2011, melainkan hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Saldo Piutang UWTO belum dapat diyakini kewajarannya karena BP Batam baru melakukan verifikasi dan pendataan kembali piutang UWTO hanya sejak tahun 2006 hingga sekarang, padahal penyewaan lahan telah dilakukan sejak tahun 1991. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat menelusuri dan meyakini kewajaran saldo piutang usaha.

Catatan 8 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Tetap pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 14,18 triliun dan Rp 14,18 triliun. BP Batam belum menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas LK BP Batam Tahun 2010 untuk melakukan rekonsiliasi dan mempertanggungjawabkan perbedaan pencatatan aktiva tetap sebesar Rp 37,72 miliar, sehingga

juga mengungkapkan, Belanja Operasional pada Laporan Surplus Defisit pada periode yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp 39,95 miliar. BP Batam membebaskan belanja tahun sebelumnya minimal sebesar Rp 15,22 miliar pada periode 1 Januari s.d. 4 Februari 2011. BPK berkeyakinan

bahwa masih terdapat belanja tahunan sebelumnya yang dibebankan pada tahun 2011 dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan verifikasi terhadap populasi belanja operasional sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran saldo belanja operasional tersebut.

Karena permasalahan yang diuraikan tersebut, BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan BP Batam tanggal 4 Februari 2011. (as), foto : [agung s/parle/hr.](#)

Presiden Ukraina Akan Berkunjung ke Indonesia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (17/10) menerima kunjungan kehormatan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia Volodymyr Vechenko. Maksud kedatangannya ke Indonesia, selain membicarakan peningkatan hubungan parlemen kedua negara, juga dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan rakyat kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada bulan Februari tahun depan. Sebagai persiapan kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Januari yang akan datang.

Menurut Volodymyr, hubungan antara Ukraina dan Indonesia telah terjalin dengan baik selama ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Untuk lebih mempererat lagi hubungan kedua negara maka pada bulan Desember mendatang akan ditandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara Parlemen Ukraina dan DPR-RI.

“Dengan penandatanganan MOU tersebut akan lebih mempererat hubungan kedua parlemen sehingga sampai bulan Februari-saat Presiden Ukraina berkunjung ke Indonesia, sudah ada hasil,” ungkap Volodymyr.

Ditambahkannya, dengan penandatanganan MOU men-



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat bertukar cinderamata dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia.

jadi bukti bahwa hubungan kedua parlemen telah lebih maju dibanding sebelumnya. Untuk menyukseskan kunjungan Presiden Ukraina, pihaknya juga akan meminta dukungan Kedubes Ukraina di Jakarta, sehingga kerja sama kedua parlemen makin meningkat di masa yang akan datang.

Hadir mendampingi Ketua BKSAP adalah anggota Dewan lintas fraksi Hidayat Nurwahid, Tantowi Yahya, Nazaruddin Kemas, H. Paiman dan Iskan Qolba Lubis serta Dubes Indonesia untuk Ukraina Niniek Kun Naryantie. (mp), foto : [naefuroji/parle/hr.](#)

Perlu Tim Bayangan Untuk Kuasai Inalum

Persiapan pengambilalihan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 1 November 2013 masih dipertanyakan Komisi VI. Sejauh mana pemerintah menyiapkan tim bayangan yang akan mengoperasikan PT. Inalum pasca-serah terima dari perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Anggota Komisi VI DPR Chaeruman Harahap (F-PG) mempertanyakan kesiapan tim bayangan tersebut dalam rapat Panja Inalum Komisi VI, Rabu (16/10). Rapat menghadirkan Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemen BUMN yang selama ini mengatur teknis pengambilalihan Inalum ke pihak pemerintah Indonesia.



Anggota Komisi VI DPR Chaeruman Harahap.

Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG).

Tim bayangan yang dimaksud adalah dewan direksi dan komisaris baru yang mengisi PT. Inalum. Termasuk di dalamnya upaya pengamanan pengambilan tersebut oleh aparat keamanan. “Bagaimana persiapan kita, sudah adakah direksi bayangan,” tanya Chaeruman dalam rapat tersebut.

Tim bayangan itulah yang selama ini mengawasi hari demi hari menjelang pengambilalihan. “Demi merah putih perundingan harus sudah maksimal dilakukan.”

Pada bagian lain Chaeruman juga mempertanyakan kepada pemerintah perihal bagian keuntungan yang bisa diterima Pemda setempat. Selama ini sumber daya alam di Asahan sudah

dieksplotir selama perusahaan itu beroperasi. Harus ada pembagian yang adil bagi daerah. Masyarakat di Sumatera Utara, lanjut Chaeruman, juga perlu dihargai. Mereka berhak mendapat perhatian pemerintah setelah PT. Inalum diambil alih pemerintah Indonesia. (mh)/foto:iwan armanias, odjie/parle/iw.

DPR Minta Program PNPM Mandiri Dipertahankan



Anggota Komisi X DPR Muslim.

Anggota Komisi X DPR Muslim meminta agar program PNPM Mandiri tetap dipertahankan. Menurutnya, program untuk desa wisata ini efektifitasnya sudah cukup bagus. Namun, perlu ada maksimalisasi di formatnya.

“PNPM Mandiri harus berjalan terus. Efektifitas dari program ini sudah cukup bagus. Tapi, formatnya harus dimaksimalkan lagi. Dana bukan hanya diberikan saja, namun ini juga perlu ada pembinaan,” ujar Muslim saat RDP dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gedung Nusantara I, Rabu (16/10).

Politisi Demokrat ini menyatakan, jika ingin membina desa wisata, harus dilakukan secara berkesinambungan. Pembinaan itu dapat dilakukan dengan bentuk dukungan kepada industri kreatif dan pengrajin di daerah.

“Di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya, banyak pengrajin kreatif. Ini juga harus didukung. Mereka menjual souvenir dan cinderamata khas daerah. Saya yakin, jika mereka sudah disupport, mereka akan jalan sendiri,” tambah Politisi asal Aceh ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X Dedi S Gumelar. Menurutnya, Program PNPM Mandiri itu harus dipertahankan. “Misalnya untuk perbaikan infrastruktur desa wisata, itu akan bermanfaat untuk masyarakat desa,” ujarnya.

Dalam rapat ini, Dedi juga menyoroti ketidakadilan pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata di daerah-daerah. Ia menilai, pemerintah tidak berani menyelenggarakan event internasional selain di Bali. Padahal potensi



Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar.

wisata di daerah lain cukup banyak.

“Giring swasta ke Danau Toba, Toraja, atau potensi wisata lainnya, sehingga dengan ini tercipta ‘Bali’ yang lainnya. Kalau seperti ini, Bali semakin makmur, tapi daerah lain bisa miskin. Ini sangat tidak berkeadilan,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri ini, Komisi X menyetujui usul pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2014 di masing-masing Eselon I Kememparekraf. Total anggaran itu sebesar Rp 1,7 triliun.

Rinciannya, Ditjen Pemasaran Pariwisata mendapatkan alokasi sebesar Rp 474 miliar, Rp 372 miliar untuk Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kemudian, Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebesar Rp 242 miliar, dan Ditjen Ekonomi Berbasis MDI sebanyak Rp 112 miliar. Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf mendapatkan Rp 315 miliar, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 162 miliar, dan Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 24 miliar. Namun, Komisi X memberi catatan pada persetujuan tersebut.

“Kememparekraf perlu melakukan upaya efisiensi, rasionalisasi dan penajaman program. Seperti program peningkatan PNPM Mandiri bidang pariwisata di Ditjen Pengembangan Dinas Destinasi Pariwisata yang sebagian direlokasi untuk program perancangan destinasi dan investasi pariwisata. Selain itu, program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pemasaran Pariwisata yang sebagian direlokasi untuk program peningkatan promosi pariwisata dalam negeri,” jelas Syamsul. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

Ketua DPR Ingatkan Petugas Haji Bekerja Sungguh-sungguh

Ketua DPR Marzuki Alie mengingatkan kepada para petugas Haji Indonesia untuk bersyukur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Para petugas ini menurutnya diberikan kesempatan untuk ikut menunaikan rukun Islam tanpa harus antri sekian tahun seperti yang dialami para jemaah, yang saat ini waktu tuangnya sudah mencapai 14 tahun.

“Selain itu para petugas juga tidak perlu membayar BPIH dan justru menerima honor dari negara serta diberikan lapangan amal untuk bisa mendapatkan pahala. Dengan berbagai kelebihan itu para petugas haji hendaklah tetap menjaga amanah melaksanakan tanggung jawabnya,” ujar Marzuki usai pertemuan taaruf yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan juga dalam kesempatan mengunjungi para Jemaah di Maktab di Makkah, Minggu (13/10).

Dalam *release* yang diterima Parlemen, Ketua DPR juga mengingatkan bahwa para petugas haji hendaknya lebih mendahulukan tugas-tugasnya melayani para jemaah



Ketua DPR Marzuki Alie.

haji dan tidak meninggalkan tugasnya melayani Jemaah, hanya untuk mengejar keutamaan melaksanakan ibadah. “Menjadi petugas yang mendampingi para jemaah itu tugas yang mulia. Jangan karena misalnya mengejar pahala 100 ribu kali lipat jika sholat di Masjidil Haram membuat petugas meninggalkan kewajibannya,” tambahnya.

Para petugas menurutnya tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pahala, karena melayani para jemaah

di tanah suci tentunya pahalanya pun akan berkali-kali lipat. “Apabila para Petugas Haji sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penuh ketulusan dalam melayani, keikhlasan dan kesabaran, Insya’allah para Petugas Haji akan mendapat kebaikan berlipat ganda. Mendapat pahala karena sudah melaksanakan tugas dengan baik dan Insya’allah hajinya tetap mabrur,” jelasnya.

Sebaliknya, kata Marzuki apabila meninggalkan jemaah atau tanggung jawabnya sebagai Petugas Haji, maka hukumnya berdosa, hajinya pun tidak akan mabrur dan uang yang diterimanya pun tidak akan menjadi berkah. “Oleh karena itu jadilah petugas yang bertanggungjawab dan menjalankan haji dengan baik, Insya Allah pulang-haji jadi haji mabrur,” imbuhnya.

Para petugas yang mendengarkan pun sontak menjawab bergemuruh dan menyatakan siap dengan mengangkat tangan ke atas tanda siap melaksanakan amanahnya dengan baik dan sungguh-sungguh. (*,mp), foto : wahyu/parle/hr.

Pemprov Sumut Harus Disertakan Dalam Pengalihan Inalum

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) harus disertakan dalam proses pengambilalihan PT. Inalum dari perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium (NAA) ke pemerintah Indonesia. Selama ini, pemerintah daerah kurang mendapat tempat dalam proses operasional PT. Inalum. Padahal, perusahaan ini berada di Asahan, Sumut.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Lukman Edi (F-PKB) dalam rapat Panja Inalum, Rabu (16/10). Lukman setuju adanya pengambilalihan PT. Inalum oleh pemerintah Indonesia. Dan metode pengambilalihan itu dengan *share transfer*. “Pemerintah harus terus mendorong proses pengambilalihan ini, tanpa menunggu proses arbitrase,” kata Lukman di hadapan



Anggota Komisi VI DPR Lukman Edi.

rapat penguasaan saham ini. Komisi VI masih terus intensif membahasnya. Yang jelas sebelum resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia, persoalan ini sudah bisa diselesaikan. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Dan yang terpenting, lanjut Lukman, pemerintah daerah setempat perlu dilibatkan dalam proses pengalihannya. Pemda setempat juga sangat menginginkan peran dalam proses PT. Inalum menjadi perusahaan nasional. “Perlu ada pembicaraan dengan Pemda Sumut. Suara mereka perlu didengar,” tandas Lukman lagi.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut juga menyatakan kesiapannya mengambil saham Inalum sebesar 58,88% yang sesungguhnya milik NAA. Belum ada keputusan final menyang-

Kejujuran dan Tanggungjawab Dirjen PHU Diapresiasi Ketua DPR

Ketua DPR Marzuki Alie mengapresiasi jajaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh memperbaiki pelayanan haji kepada para jemaah haji Indonesia. Marzuki juga mengapresiasi sikap Dirjen PHU Anggito Abimanyu yang mau mengakui kekurangan-kekurangan serta terus melaksanakan perbaikan-perbaikan layanan haji.

“Saya melihat banyak perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh jajaran Ditjen PHU secara khusus dan Kementerian Agama secara umum. Saya melihat Dirjen PHU Anggito terus terang dan jujur mengakui kekurangan-kekurangan itu, tidak seperti sebelumnya semua dibantah seolah semua sudah sempurna,” ujar Marzuki dalam Taaruf dengan jajaran Kementerian Agama di Makkah menjelang ibadah wukuf belum lama ini.

DPR, kata Marzuki Alie, sangat mengapresiasi kerja keras para petugas haji yang telah mempersiapkan semua fasilitas yang diperlukan oleh jemaah. Namun harus juga diakui masih ada kekurangan-kekurangan yang harus terus diperbaiki.

“Harus diakui juga masih ada pemondokan yang dibawah standar khususnya di sektor IV Bahutmah. Dalam pengecekan ke lapangan, situasi pemondokan jemaah di sektor IV sangat memprihatikan. Lift hanya satu untuk



Ketua DPR Marzuki Alie.

600 jemaah, AC tidak menyala, sehingga udara panas, ranjangnya tidak kuat sehingga jebol dan suasananya sangat tidak sehat,” tegasnya.

Selain itu masih ada pemondokan yang masih terletak jauh dari Masjidil Haram, sehingga para jemaah itu harus menggunakan uang *living cost* mereka selama di Makkah. Marzuki pun meminta kepada Dirjen Haji untuk mengusulkan kepada Komisi VIII agar kepada jemaah tersebut diberikan kompensasi. “Dirjen menjanjikan akan mere-negosiasi pemilik rumah, berapapun yang dikembalikan akan diserahkan ke jemaah,” ujar Marzuki.

Pimpinan DPR ini berharap kepada Dirjen Haji, agar kepada para jemaah selama di Makkah mengurangi *living cost* dan memberikan konsumsi kepada para jemaah seperti halnya di Madinah. “Para jemaah haji datang untuk beribadah, saya melihat lebih baik *living cost* dikurangi untuk biaya konsumsi jemaah karena mereka kan datang ke Makkah untuk beribadah sehingga tidak perlu dibebani dengan tugas mencari makan atau masak sendiri,” tegasnya.

Kepada para petugas kesehatan, Marzuki juga mengingatkan agar disediakan obat-obatan untuk berbagai penyakit. “Orang yang berhaji datang dari seluruh penjuru dunia, maka penyakitnya pun datang dari seluruh dunia. Kita juga harus bisa menyiapkan obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang meski tidak ada di Indonesia, tapi bisa muncul di tanah suci dan menjangkiti jemaah Indonesia,” tandasnya.

Lebih lanjut Ketua DPR mengemukakan, dirinya maupun masyarakat Indonesia yang berhaji menyadari pelayanan haji ini tidak akan pernah sempurna dan pasti ada kekurangan. Yang penting ungkapnya, adalah komitmen untuk selalu lebih baik. “Yang penting dibangun adalah kebersamaan sesama jemaah dan petugas kloter yang akan menutupi rasa kekurangan tersebut. Namun demikian semua keluhan itu ditampung dan akan dibicarakan dengan Kementerian Agama,” tandasnya. (*mp), foto : wahyu/parle/hr.

PT Inalum Diserahkan ke Pemerintah 1 November 2013

PT. Indonesia Aluminium Asahan (Inalum) yang selama ini dikuasai perusahaan Jepang NAA, akan segera diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada 1 November 2013 mendatang. Kemungkinan besar PT. Inalum menjadi persero. Hanya saja persoalan transfer

aset dan saham perusahaan tersebut masih jadi perdebatan.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementan

BUMN, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin, dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rabu (16/10) yang membahas pengambilalihan PT. Inalum dari perusahaan asing milik Jepang ke pemerintah Indonesia.



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto didampingi Wakil Ketua Erik Satria Wardhana dan Azam Azman.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG), didampingi tiga wakilnya, Erik Satria Wardhana (F-Hanura), Azam Azman (F-PD), dan Aria Bima (F-PDI Perjuangan). Sempat dipertanyakan oleh hampir seluruh

anggota Komisi VI soal bagaimana aset dan sahamnya bisa sepenuhnya diambilalih oleh pemerintah Indonesia. Pihak pemerintah dalam rapat tersebut menawarkan metode transfer aset atau transfer saham untuk pengambil-

alihan tersebut.

Persoalan ada selisih aset yang belum disepakati antara PT. Inalum dan pemerintah Indonesia, maka ada upaya hukum yang sedang diajukan ke arbitrase internasional. Komisi VI merasa khawatir, arbitrase akan dimenangkan pihak Jepang. Anggota Komisi VI Daniel Lumban Tobing (F-PDI Perjuangan), menegaskan, bila pemerintah tidak yakin menang di pengadilan arbitrase, sebaiknya mundur saja. "Ini menyangkut harga diri bangsa," katanya.

PT. Inalum sendiri telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1975. Dan kontraknya akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Perusahaan ini memproduksi peleburan aluminium dan pembangkit tenaga listrik. Lokasinya berada di Kuala Tanjung, Batubara, Medan, Sumatera Utara. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Baleg dan Pemerintah Sepakat Tarik Dua RUU Prolegnas

Badan Legislatif DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat tarik dua RUU dari Program Legislasi Nasional. Dua RUU tersebut yaitu RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RUU PPDT) dan RUU Revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres).

Kesepakatan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Baleg dan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/10)

Dijelaskan Mulyono, bahwa pembahasan RUU PPDT sudah dilakukan pada tahap pembahasan DIM di tingkat Panitia Kerja (Panja). Namun pembahasannya sempat terhenti sampai waktu yang cukup lama, karena belum ada kesepakatan terhadap satu substansi yaitu judul RUU.

"Dimana substansi tersebut akan mempengaruhi substansi lainnya dalam Batang Tubuh RUU PPDT," kata

Mulyono.

Menurut Mulyono, kinerja pembahasan RUU PPDT sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya sebagai bahan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden. Pembahasan RUU PPDT sendiri, sampai Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 sudah memakan tujuh kali masa sidang.

"Karena RUU sudah dalam tahap pembicaraan DPR, hal ini Baleg dengan Pemerintah yang diwakili Menteri, maka kesepakatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan atau menarik RUU harus disetujui bersama antara DPR dan pemerintah," papar politisi Partai Demokrat.

Keputusan Raker Baleg dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada 10 Oktober 2013, dilaporkan Mulyono, disepakati untuk menarik RUU PPDT dari proses pembahasan pada tingkat I dan menarik dari daftar Prolegnas 2013.



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono.

Sedangkan RUU Pilpres, dilaporkan Mulyono, telah diputuskan dan disepakati penyusunannya tidak dilanjutkan dan draft RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2013, sebagaimana keputusan Rapat Pleno Baleg tanggal 3 Oktober 2013.

Dijelaskan Mulyono, bahwa ada dua fraksi yaitu Fraksi PPP dan Fraksi Hanura yang tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Sementara, Dua fraksi yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra menghormati keputusan yang telah disepakati dan menyetujui hasil penyusunan draft RUU yang telah dilakukan oleh Panja yang masih menyisakan satu substansi yang belum disepakati oleh Fraksi-fraksi yaitu mengenai ketentuan *Presidential Threshold*.

RUU Pilpres sendiri, ujar Mulyono, diusulkan Baleg dan RUU Pilpres terse-

but masih dalam tahap penyusunan. “Maka yang dapat melakukan penarikan adalah Baleg sendiri,” tegasnya.

“Keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres dan penarikan draft dari RUU Prioritas 2013 akan dilaporkan dalam Rapat

Paripurna DPR RI,” imbuhnya. (sc)/
foto:odjie/parle/iw.

Komisi VIII Sesalkan Pengaturan Pembagian Daging Kurban di Masjid Istiqlal



Anggota Komisi VIII DPR M Baghowi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, M Baghowi sangat menyesalkan adanya korban jiwa saat antri pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal, Rabu (15/10). Meski kemudian diketahui bahwa penyebab meninggalnya pria berusia tujuh puluh empat tahun itu bukan akibat desak-desakan saat antri daging kurban, melainkan karena adanya riwayat penyakit darah tinggi yang sudah dideritanya sebelumnya.

“Adanya masyarakat yang rela antri menandakan bahwa masih ada-

nya masyarakat yang membutuhkan daging kurban. Jika kemudian terjadi desak-desakan hingga merenggut korban jiwa, walau akhirnya hal itu terbantahkan karena ternyata korban sudah sakit sebelumnya, tetapi hal tersebut tetap sangat saya sesalkan. Seharusnya dengan pengaturan yang lebih baik lagi, bahkan jika perlu bisa melibatkan aparat kepolisian atau TNI, kejadian desak-desakan itu bisa diantisipasi sebelumnya,” jelas Baghowi.

Pengaturan yang dimaksud Baghowi itu juga menyangkut fasilitas yang disediakan panitia kurban bagi para kaum dhuafa yang berhak mendapatkan daging Kurban. Seperti halnya tenda-tenda atau bahkan kursi yang bisa digunakan warga saat antri. Selain itu panitia bisa menyediakan air minum. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kepanasan atau kelelahan saat mengantri daging kurban atau pembagian zakat lainnya.

Ditambahkannya, panitia pembagian kurban jangan berbangga hati dengan banyaknya warga atau masyarakat yang mengantri. Karena kesuksesan pembagian daging kurban itu bukan dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengantri. Melainkan kelancaran dari pembagian daging kurban sendiri yang tepat sasaran,

sebagaimana dalam Al Quran, dimana daging kurban diperuntukkan untuk orang miskin atau tidak mampu.

“Saran agar panitia kurban yang mendatangi warga atau masyarakat yang membutuhkan daging kurban itu baik. Namun, jika ada orang yang datang ke sebuah masjid dan rela antri untuk mendapatkan daging kurban, artinya dia itu membutuhkan daging tersebut. Karena memang tidak mampu, sedangkan yang berhak menurut Al Quran itu orang miskin atau orang tidak mampu, jadi bukan orang yang datang atau didatangi. Sehingga jika orang tersebut merasa tidak mampu, maka orang yang datang ke panitia lah yang seyogyanya didahulukan,” paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa pembagian daging kurban itu sekaligus membina masyarakat untuk sadar berkorban. Sehingga ketika di tahun berikutnya jumlah pihak yang berkorban semakin banyak, artinya panitia kurban di masjid tersebut berhasil mengajak dan membina masyarakat sekitar akan pentingnya berkorban. Maka hal itulah yang menurut Baghowi juga menjadi tolak ukur kesuksesan panitia kurban sebuah masjid. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

RUU ASN : Tidak Ada Intervensi Politisi Dalam Pengangkatan Jabatan

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada lagi pengangkatan jabatan dalam jabatan-jabatan Birokrasi di pemerintahan yang diintervensi oleh kaum politisi.

“Kaum politisi itu pintu masuknya dimana, yah di jabatan Menteri, Presiden, Gubernur, Bupati, kami mau pangkas itu, oleh karena itu tolong beri kami jaminan, lewat RUU ASN ini, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati tidak lagi intervensi dalam pengangkatan jabatan di birokrasi, namun

dengan catatan tanpa mengurangi haknya untuk memilih,” kata Agun saat Komisi II Raker dengan Meneg PAN dan RB Azwar Abubakar, di DPR, Jakarta, Rabu (16/10).

Di kesempatan ini, Agun pun menyoroiti mengenai kewenangan



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Wakil Ketua Arif Wibowo.

KASN dalam menentukan tiga nama yang diajukan dan bukan oleh Panitia Seleksi, menurut Agun, Panitia Seleksi tetap harus ada di masing-masing Kementerian dalam menangani masalah-masalah teknis, namun tetap dalam koridor KASN.

“Ada keterlibatan KASN dengan lembaga pemda, provinsi dan kabupaten, komposisinya bisa kita atur, tapi yang menentukan tiga orang itu yah KASN, bukan Timsel, jadi Timsel bisa saja

mengajukan ke KASN sejumlah nama yang lebih banyak,” jelas Agun.

Selain itu, ujar Agun dalam RUU ASN, DPR juga mengagaskan tidak ada lagi istilah pegawai pusat dan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Negara PAN dan RB Azwar Abubakar menjelaskan mengenai pegawai pusat dan daerah dirinya sependapat tidak ada lagi penyebutan hal tersebut dan diganti dengan Pegawai ASN.

Kemudian tambahnya, mengenai politisi tidak terlibat dalam pengangkatan, ia setuju, “Jadi bukan Menteri, Gubernur, atau Bupati yang mencari 3 orang itu, ini prinsip, namun kalau semua diserahkan ke KASN kita belum sepakat, karena terlalu banyak, maka kita tetap ingin ada panitia,” terang Azwar.

Panitia ini menurut Azwar, lebih banyak kepada *assesment* dan psikotes, dan porsi wawancara hanya 20 persennya. “Lebih banyak ke *assesment* nya yang akan kita buka dimana-mana, jadi jika di ibaratkan, buah yang akan dimakan ini sudah masak dan steril, KASN tidak harus memasak, KASN mengawasi si juru masaknya, gitu kira-kira,” jelasnya.

Ia berharap, agar tidak ada kesan pengaturan eselon satu itu diberikan kepada satu lembaga *superbody*, namun tugasnya harus dibagi-bagi, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, “Tidak bisa kita kasih semua ke KASN, jadi KASN tetap ada, Panitia tetap ada, dan Bupati, Gubernur dan Menteri hanya memilih 1 diantara 3,” tegasnya.

(nt) foto:ry/parle

DPR Akan Panggil Paksa Disnaker Tangerang

Komisi IX kali ini dibuat geram oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang dan direksi PT Shinta Group-Tangerang. Pasalnya, ini kedua kalinya undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilayangkan kepada kedua pihak tersebut, namun tidak digubris. RDPU rencananya akan membahas persoalan nasib buruh.

“Kita mau panggil paksa Kepala Disnaker Tangerang dan direksi PT Shinta Group. Dahlan Iskan saja kita bisa panggil paksa untuk menyelesaikan masalah *outsourcing*,” tegas Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, di ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kamis (10/9).

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan ketidaktegasan Pemkot Tangerang, dimana PT Shinta Group Tangerang berdomisili, yang mengakibatkan pejabat dan perusahaan di wilayahnya tidak taat aturan. Menurutnya, jika Pemkot bertindak tegas, kasus itu tak perlu dibawa ke DPR. Pasalnya, pemerintahlah yang bisa mencabut izin perusahaan, sedangkan DPR hanya bisa memberikan *statement politik*.



Anggota Komisi IX DPR Indra.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Indra mendesak Kemenakertrans untuk melacak status dua warga asing yang menjadi direksi di perusahaan Shinta Group Tangerang. Kedua warga asing itu dicurigai menyalahgunakan administrasi keimigrasian.

“Saya minta pemerintah telusuri izin kerja direksi Shinta Grup, dua tenaga asing yang ada di Shinta Group. Kita bisa minta tolong Kapolres untuk menangkap dua orang asing yang patut dipertanyakan tujuannya di negeri ini. Kalau betul ingin ingin investasi kita akan dukung karena kita butuh investasi. Kalau melanggar hukum harus dipastikan dapat terlindungi,” kata Indra.

Terkait persoalan yang menimpa buruh, Politisi PKS ini-

mendorong pentingnya peran pemerintah. Indra berharap ada intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan buruh.

“Buruh melakukan demonstrasi, itu pertanda ada masalah. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Karena itu pemerintah perlu menelusuri masalahnya. Jika ditemukan masalah, pemerintah harus bisa menertibkan,” ujar Indra. (sf)foto:odjie/parle/wy

Citra dan Wibawa MK Bisa Dipulihkan



Wakil Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristanto, Mahfud MD, dan Anggota Komisi III Ahmad Yani.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD optimis citra dan wibawa lembaga MK bisa dipulihkan setelah kasus Ketua MK Akil Mochtar diselesaikan. Menurutnya, penangkapan Akil merupakan keberhasilan KPK dan tidak ada rekayasa untuk menghancurkan MK.

“Saya yakin, tidak ada rekayasa untuk menghancurkan MK. Siapa pun yang terlibat dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang dialami oleh Akil Mochtar akan diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi hukum setimpal,” jelas Mahfud MD pada diskusi Dialektika Demokrasi, bertema “Masihkah MKRI Dipercaya”, di Press Room, Gedung Nusantara III, Kamis (10/10).

Selain Mahfud, hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi III Ahmad Yani dan Wakil Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristanto.

Seperti diberitakan di berbagai media, Akil ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga terlibat dalam upaya suap terkait dengan pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

“Kasus Akil Mochtar itu fakta, dan logikanya tidak mungkin Akil bekerja sendiri. Dalam kasus suap, pasti ada penyuap, dan lain-lain yang mengikuti. Yang pasti, Akil ditangkap bersama dua tamunya yakni Chairun Nisa dan Carlos Nalau. Kemudian, ada lagi yang ditangkap yakni Hambit Bintih, Susi Tur Andayani, dan Tubagus Chaeri Wardana,” tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Yani menilai selama ini sudah banyak terobosan hukum yang dibuat oleh MK. Ini menjadi sejarah tersendiri. Walaupun Ketua MK sudah ditangkap karena kasus penyuapan, namun bukan berarti langsung mengubah kewenangan MK.

“Kita bisa marah, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk mengubah MK. MK ini dibuat dengan sangat ideal, dalam rangka melaksanakan *check and balance* pembuatan Undang-undang,” jelas Politisi PPP ini.

Pekan lalu, Presiden menyatakan rencana pemerintah untuk menerbitkan Perppu soal MK. Perppu ini berisi antara lain Komisi Yudisial (KY) yang akan mengawasi hakim MK. Namun, Yani mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bahaya bila menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal MK.

“Saya kira kami menolak penerbitan Perppu itu. Kalau dipaksakan ini ada ruang *impeachment* (pemakzulan) terhadap Presiden. Soal pengawasan oleh KY itu kan sudah pernah diputuskan KY. Kalau KY sudah tidak boleh mengawasi MK maka adakan pengawasan lain. Tinggal kita cari solusi masalahnya. Pemerintah juga bisa mengajukan perubahan UU MK kepada DPR,” jelas Yani.

Dalam penjelasannya, Hasto Kristanto menyatakan maraknya kasus pengaduan sengketa pemilu ke MK karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak beres. Menurutnya, jika penyelenggara pemilu itu beres, maka tidak ada kasus sengketa pemilu yang masuk ke MK.

“Publik jangan terlalu fokus pada kasus suap di MK yang melibatkan Akil Mochtar, tetapi juga KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Bayangkan, di MK itu ada sekitar 634 kasus sengketa pilkada. Padahal, kalau penyelenggara pemilu baik, semua akan baik,” jelas Hasto. (sf)Foto:wahyu/parle



Perlu Dikaji Sengketa Pilkada Kembali Ke Pengadilan Tinggi

Mencuatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada), direspon cepat oleh DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Nurdirman Munir kepada Parlemen, mengusulkan penanganan PHPU Pilkada ke depan, tidak lagi ditangani oleh MK, namun cukup di pengadilan tinggi. “Kita mengusulkan sengketa pilkada kembali ke pengadilan tinggi, tujuannya supaya MK betul-betul *khushuk* ngurusin yang berhubungan dengan MK saja,” kata Nurdirman Munir, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10).

Di samping itu politisi dari Partai Golkar itu juga mengusulkan, agar dalam Undang-Undang dicantumkan bahwa MK tidak boleh keluar dari apa yang dimohonkan. “Putusan MK

yang ultra petitem itu sering keluar dari kewenangan, bahkan mengambil kewenangan orang lain. Seperti penetapan pemenang pemilu, itu kan wewenangnya KPU bukan MK. Ini kan ngawur,” ujarnya.

Nurdirman Munir juga mengingatkan perlunya lembaga pengawas terhadap MK. Ketiadaan lembaga pengawas dalam sebuah lembaga negara bisa menimbulkan *abuse of power*. “MK kan bukan Tuhan. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja salah, khilaf atau sengaja berbuat salah karena ada kepentingan uang atau kekuasaan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, ada baiknya Majelis Kehormatan yang dibentuk MK dalam kasus Akil Mochtar ini ditetapkan sebagai lembaga pengawas MK. “Intinya harus diperlukan lembaga pengawas. Saya lebih setuju Majelis Kehormatan yang dibentuk MK itu



Anggota Komisi III DPR Nurdirman Munir.

ditingkatkan wewenangnya oleh UU menjadi lembaga pengawas yang ditetapkan sebagai lembaga pengawas MK, supaya ada *balance of power*. Lagian, mana ada di dunia ini ada suatu badan atau lembaga tanpa ada pengawas,” tukasnya. (nt)foto:wahyu/parle

DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo menolak kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU).

“Apakah memang diperlukan Lemsaneg membantu KPU atau tidak. Tetapi, sejauh ini dari FPDIP bersikap memang menolak,” kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Arif, alasan pertama FPDIP menolak kerja sama itu, lantaran dari lima ayat yang ada di dalam MoU, empat di antaranya menimbulkan kekhawatiran. “Pengalaman pemilu (pemilihan umum) lalu dengan kemudahan IT (*Information Technology*) justru menjadi alat untuk memanipulasi



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

(data), alat untuk mempropaganda untuk partai politik tertentu yang kemudian diberikan oleh partai,” ujarnya.

Kedua, fungsi dan peran Lemsaneg yang menurut mereka memiliki ke-

wajiban dalam pertahanan keamanan negara untuk menangkal serangan dari pihak luar bukan kerjasama dengan KPU. “Dan kalau dibutuhkan adalah untuk melakukan operasi-operasi tertentu demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

“Jadi sementara dalam konteks KPU adalah urusan domestik internal. Serta, prinsip-prinsip yang dipakai oleh KPU kan harus transparan, jurdil, bisa dikontrol, ada partisipasi publik dan sebagainya. Dengan keterlibatan Lemsaneg saya kira tidak memungkinkan itu bisa dilakukan,” ujarnya melanjutkan.

Sementara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini juga menolak kerja sama antara KPU dan Lemsaneg dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Se-

bab, kedua institusi itu berbeda tugas, kewenangan, dan karakteristiknya.

“Kalau KPU yang diberi tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilu mendatang, karakteristiknya jelas, harus terbuka dan transparan dalam bentuk apa pun. Sementara Lemsaneg sesuai UU yang memayunginya, memang karakternya harus tertutup. Nah, bagaimana mungkin kerja sama itu dapat berjalan,” katanya.

Jazuli mengatakan Komisi II DPR merasa perlu meminta penjelasan KPU mengenai kerja sama dengan Lemsaneg. Meskipun pekan lalu KPU, Lemsaneg dan sejumlah institusi terkait telah menggelar rapat dengan Komisi

I mengenai kerja sama itu.

“Kami tetap memandang penting Komisi II menggelar rapat dengan KPU untuk membahas bentuk kerja sama dengan Lemsaneg. Karena itu, kami akan usulkan Komisi II mengangkat persoalan ini juga saat rapat dengan KPU,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lemsaneg, Mayjen Djoko Setyadi menegaskan, pemerintah tidak akan bisa mengakses data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mereka amankan. “Tidak bisa, itu kan langsung dari KPU, data dari Lemsaneg tidak ada,” kata Djoko saat RDP dengan Komisi II DPR.

Dalam kesempatan itu, Djoko memberikan jaminan tidak akan mendapatkan intervensi dari pemerintah di balik penandatanganan MoU bersama lembaga pemilihan tersebut. “Saya jamin 100 persen,” tegasnya.

Djoko menjelaskan, kerja sama dengan KPU hanya untuk memproteksi data yang dimiliki Husni Kamil Manikcs dari gangguan. Namun, mereka tetap membuka informasi kepada masyarakat sebagaimana prinsip pemilihan umum (pemilu). “Memproteksi supaya tidak diganggu orang, data yang dari pemilu itu. Rekapitulasi suara supaya tidak berubah. Bisa diakses oleh masyarakat, itu sangat terbuka,” tuntasnya. (nt) foto:ry/parle

RUU PPDK Dorong Bangsa Maju Bersama

Wakil Ketua Pansus RUU PPDK (Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan) Alex Litaay mengingatkan ketimpangan program pembangunan yang terjadi di tanah air. Konstitusi jelas menyebut Indonesia adalah bangsa maritim tetapi daerah kepulauan masih jauh tertinggal.

“Kita pasti bangga kalau daerah seperti ibukota Jakarta mulai membangun MRT transportasi yang canggih tapi kalau rakyat di daerah kepulauan masih naik kapal sama kambing, kalau musim ombak besar tidak bisa melaut 4 bulan, ini bagaimana? Pemerintah harus fikir rakyat yang di pulau-pulau itu memang warga negara kelas berapa? Seharusnya kita sama-sama menikmati kemerdekaan ini,” paparnya dalam dialog radio Bersama Wakil Rakyat kerjasama Pemberitaan Setjen DPR dengan RRI, di studio Parlemen, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/13).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku ia mengaku sering mendapat laporan tentang ibu hamil di kepulauan kecil yang kesulitan mencapai rumah sakit untuk operasi caesar hanya karena ombak besar yang menghalangi mereka. “Tidak ada Puskesmas Keliling, tidak ada kapal besar yang layak, terus apakah kita biarkan

ibu itu harus meninggal tidak berdaya, ini kan tidak adil,” tandasnya.

Untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah kepulauan ini DPR telah mengajukan RUU PPDK yang diharapkan menjadi solusi mengejar ketertinggalan daerah kepulauan.



Wakil Ketua Pansus RUU PPDK Alex Litaay.

Sebenarnya dalam UU no.32/2004 tentang Pemda sudah ada amanat agar pemerintah menyelesaikan PP terkait daerah kepulauan, tetapi setelah 10 tahun berlalu hasilnya nihil.

“Dalam kondisi sekarang lebih baik mengaturnya dalam UU khusus yang sudah kita bahas dalam 5 kali masa sidang. Pemerintah semula bertahan tetap mengaturnya dalam UU Pemda

namun dalam rapat terakhir sudah ada kesepakatan UU PPDK diperlukan,” jelas politisi FPDIP ini.

Kebijakan mendasar yang harus dikoreksi diantaranya selama ini anggaran pembangunan seperti Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan. Ini jelas tidak adil bagi 8 provinsi pendukung UU PPDK dan sejumlah kabupaten yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada daratan.

“Maluku itu 93 persen laut dan 7 persen wilayahnya daratan, Tidak jauh berbeda Malut, NTB, NTT, Babel, Riau, Kepri dan Sulut. Demikian pula Kabupaten Mentawai di Sumbar atau Raja Ampat di Papua. Apalagi tantangan pembangunan di daerah kepulauan ini lebih rumit dan perlu anggaran yang lebih besar,” ujarnya.

Dahulu Presiden Soekarno pernah berkeinginan mendirikan perguruan tinggi yang khusus mendalami ilmu kelautan di Ambon bekerja sama dengan Rusia. “Kalau itu terwujud Maluku bisa jadi rujukan masalah kelautan dunia, dari wilayah ini akan lahir pelaut-pelaut ulung Indonesia yang disegani di kancah internasional. Ini baru benar negara bahari,” demikian Alex. (iky) foto:iwan armanias/parle.

BAKN Desak Inspektorat Daerah Siapkan Sistem Kontrol Tunjangan Profesi Guru



Ketua dan Anggota BAKN bersama jajaran Inspektorat Kabupaten/Kota Provinsi Kepri.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta Inspektorat Daerah agar menyiapkan sistem kontrol atas Tunjangan Profesi Guru, dengan memanfaatkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina sistem pengendalian intern pemerintah.

Hal ini ditegaskan Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (10/10), Aula Graha Kepri Batam Center, Batam.

Sumarjati Arjoso dari Fraksi Partai Gerindra menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat adanya masalah Penyaluran Dana Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

BAKN mencatat dari sumber Hasil Audit Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2013, terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan per Juli 2012 untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia sebesar Rp 1,61 Triliun (43,40%) dari Rp 3,71 Triliun pagu anggaran. Masih terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru per Juli 2012 yang belum disalurkan sebesar Rp 194,67 miliar, dengan rincian: Rp 168,50 miliar TA 2012, Rp 21,91 miliar TA 2011, dan Rp 4,26 miliar TA 2010.

Untuk Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru per Juli 2012 yang belum dibayarkan sebesar Rp 27,44 miliar dengan rincian: Rp 5,00 miliar (100%) di Kabupaten Natuna, Rp 189 juta (47%) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rp 980 juta (43%) Kabupaten Karimun, minus Rp 487 juta (kelebihan penyaluran) Kota Batam, Rp 14,08 miliar (100%) Kota Tanjung Pinang, Rp 6,25 miliar (100%) Kabupaten Lingga, dan Rp 938

juta (55%) Kabupaten Bintan.

Menurut BAKN salah satu cara untuk memperbaiki efektivitas penyaluran dana sertifikasi guru tersebut adalah dengan Perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan meningkatkan fungsi pengawasan inspektur Jenderal Kabupaten Kota. Sumarjati mengatakan BAKN berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Jenderal di Kabupaten/Kota betul-betul serius menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Luasnya lingkup pekerjaan Dinas Pendidikan dan Inspektur Jenderal di Kabupaten/Kota akan menuntut kerja sama yang kuat antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Inspektur Jenderal Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD dan berbagai pihak seperti BPKP dan BPK,” papar Sumarjati Arjoso wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. (as), foto : agung s/parle/hr.



Suasana pertemuan BKSAP DPR dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia, di Lt 4 Gedung Nusantara III, Kamis (17/10). (foto: naefuroji/parle)



Suasana rapat Baleg DPR dengan Menkumham membahas penarikan dua RUU Prolegnas, di Gedung Nusantara I, Rabu (16/10). (foto: naefuroji/parle)



Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria berjabat tangan dengan Mensos Salim Segaf Al-Jufri, dan Anggota Komisi VIII berbincang dengan Mensos di Gedung Nusantara II, Kamis (17/10). (foto: wahyu/parle)